

Inovasi Kepala Sekolah pada Pemanfaatan Dana BOS

*Nurahmawati¹, Umar², Subari³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: nurahmawati999@gmail.com, umar@uts.ac.id, subarisejarah@gmail.com

Article History: Received: 2023-11-07 || Revised: 2023-12-05 || Published: 2023-12-14

Sejarah Artikel: Diterima: 2023-11-07 || Direvisi: 2023-12-05 || Dipublikasi: 2023-12-14

Abstract

This study aims to determine how the effectiveness and influence of the appropriate principal's innovation strategy in utilizing school operational assistance funds at SMP Negeri 2 Hu'u to improve School Based Education Quality Improvement Management (MPMBS). The research method used is a mixed combination of quantitative and qualitative approaches. So, the answer from the hypothesis of this study is that there is no effect of the principal's innovation with the use of BOS funds in SMP Negeri 2 Hu'u based on the provisions Alternative hypothesis (Ha): If it is significant 0.01 then the relationship is declared insignificant so that the hypothesis is rejected, so Ha: There is no significant influence between the principal's innovation strategy in utilizing BOS funds on the quality of education in SMP Negeri 2 Hu'u.

Keywords: *School, Based, Management, Innovation, BOS.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dan pengaruh strategi inovasi kepala sekolah yang tepat dalam memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 Hu'u untuk meningkatkan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS). Metode penelitian yang digunakan adalah mixed perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sehingga, jawaban dari hipotesis penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh inovasi kepala sekolah dengan pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Hu'u berdasarkan ketentuan Hipotesis alternatif (Ha): Jika signifikan $\leq 0,01$ maka hubungan dinyatakan tidak signifikan sehingga hipotesis ditolak, sehingga Ha: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Hu'u.

Kata kunci: *Manajemen, Berbasis, Sekolah, Inovasi, BOS.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia karena mendidikan mengarahkan manusia untuk dapat belajar sepanjang hayat sehingga secara otomatis akan merubah pola pikir manusia dan mendorong peningkatan kualitas hidup manusia (Herdiansyah and Kurniati, 2020). Pendidikan di tengah masyarakat dapat berupa pendidikan formal, non formal dan in formal. Ketiga jenis pendidikan ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi kapasitas manusia. Pendidikan formal dirancang agar secara sistematis melalui berbagai regulasi yang ditetapkan dan berlangsung dibawah naungan lembaga-lembaga pendidikan misalnya sekolah, institusi dan perguruan tinggi. Pendidikan non formal dapat ditemui pada lembaga-lembaga penyedia jasa kursus maupun pelatihan sedangkan pendidikan informal adalah suatu area pendidikan yang memungkinkan perubahan pada diri manusia yang dialami secara autodidak melalui pengalaman hidup (Mayasari, 2023).

Pendidikan merupakan salah satu cara penting dalam kemajuan suatu daerah, karena pendidikan merupakan salah satu cara untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang

berkualitas. Melalui landasan-landasan pendidikan misalnya sekolah, masyarakat dapat membina dirinya agar mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan, untuk mewujudkan hal tersebut, maka sekolah membutuhkan anggaran untuk operasional pendidikan disekolah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Machali dan Hidayat, 2016:68) sebagai latar belakang lahirnya kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Secara konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) yang lebih besar kepada sekolah, memberikan keluwesan- keluwesan kepada sekolah, dan mendorong secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2007: 12). Dari kebijakan inilah kemudian mendorong munculnya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang sedang dikembangkan. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah (Hamzah, 2013). Dalam implementasi konsep Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS), sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personil sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat (para stakeholders) yang terkait, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional (Hamzah, 2013).

Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) sebagai tuntutan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sekolah sebagai lembaga pendidikan ditingkat mikro dapat meningkatkan efisiensi dan mutu Pendidikan melalui Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) dengan memaksimalkan pengelolaan pendidikan baik itu berkaitan dengan masalah administrasi, keuangan, maupun fungsi dari setiap personel sekolah dan peran serta masyarakat. Terdapat empat prinsip yang menjadi landasan dalam menterjemahkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) sesuai dengan tujuannya yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif (Depdiknas, 2007). Otonomi diartikan sebagai kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Kemampuan beradaptasi dicirikan sebagai kemampuan beradaptasi yang diberikan kepada sekolah untuk memanfaatkan, menggunakan, dan mengaktifkan aset sekolah seideal mungkin untuk lebih mengembangkan mutu sekolah. Investasi adalah terciptanya iklim yang terbuka dan berbasis popularitas. Penghuni sekolah dan masyarakat setempat didesak untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pelatihan, dan dorongan tersebut memiliki nada yang kuat serta menganggap dan memperlakukan individu di sekolah sebagai sumber daya yang penting dan mungkin dapat terus diciptakan (Machali dan Hidayat, 2016: 60).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu prinsip dalam menterjemahkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), dengan kata lain peran serta masyarakat mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan pendidikan dan evaluasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sejalan dengan pendapat Sagala (2011: 234) yang mengemukakan bahwa masyarakat akan menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, sehingga hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Kemudian Hariwibowo (2015) mengemukakan bahwa upaya peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan mutu sekolah dikukuhkan dengan mencantumkan

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tau Madrasah dalam bagian ketiga pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.

Ansori (2008) mengemukakan bahwa Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Selain itu komite juga berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan baik dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pendapat di atas sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Zulkifli (2015) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dewan pengawas sekolah berperan penting dalam memberikan komitmen positif kepada sekolah-sekolah di Indonesia, baik dalam upaya melibatkan maupun menumbuhkan dukungan daerah setempat terhadap sekolah. Komite sekolah dan dalam menciptakan pelatihan di unit instruktif. Dari beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai manifestasi dari peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat memberikan pengaruh terhadap

Afirmasi, dan BOS Kinerja. BOS Reguler adalah bantuan yang diberikan kepada sekolah dengan basis perhitungan berdasarkan jumlah peserta didik ada di sekolah penerima yang tercatat di Dapodik. Adapun besar bantuan dana BOS Reguler tahun 2023 dihitung dengan satuan biaya Rp 1.160.000/siswa/tahun untuk jenjang SMP di kabupaten Dompu. BOS Afirmasi merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus, yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada beberapa prinsip dalam penggunaan Dana BOS Afirmasi diantaranya adalah fleksibilitas, efektifitas, Efisiensi, Akuntabilitas dan Transparansi. Sasaran penerima Dana BOS Afirmasi diantaranya a). berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. b). memiliki proporsi peserta didik penerima Program Indonesia Pintar yang lebih banyak. c.) menerima dana BOS Reguler tahun anggaran 2021 yang lebih rendah. d). memiliki proporsi guru yang berstatus PNS/guru tetap yayasan yang lebih kecil. BOS kinerja merupakan program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian. Sekolah penerima dana BOS Kinerja terdiri dari a). sekolah penggerak, dengan persyaratan telah ditetapkan oleh kementerian sebagai sekolah penggerak. b). sekolah yang memiliki prestasi, dengan syarat memiliki paling sedikit 3 (tiga) peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir, memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional, penerima dana BOS reguler, tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. c). sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi, dengan syarat memiliki rata-rata nilai rapor mutu kumulatif paling rendah 4,2 pada tahun 2018 dan tahun 2019, memiliki rata-rata nilai ujian Nasional kumulatif paling rendah 60 tahun 2018 dan tahun 2019, tidak memiliki sarana toilet dan penerima dana BOS Reguler.

Penyaluran dana BOSP reguler tahun 2023 ini dilakukan dalam 2 tahap, tahap 1 disalurkan sebesar 50% pada awal Januari. Tahap 2 yaitu 50%, akan disalurkan paling cepat bulan Juli melalui rekening satuan pendidikan. Laporan keseluruhan untuk tahun anggaran 2022 merupakan prasyarat untuk distribusi tahap 1 tahun anggaran 2023. Dengan kata lain pelaporan tahunan merupakan persyaratan untuk distribusi penyaluran dana BOS tahap selanjutnya. Laporan tahap 1 merupakan prasyarat penyaluran untuk merealisasikan minimal 50% dari dana tahap 2. Laporan tahap 2 merupakan prasyarat penyaluran untuk merealisasikan minimal 50% dari dana tahap 1 tahun sebelumnya. Kemdikbud hanya menawarkan aplikasi RKAS sebagai opsi pelaporan, dengan kerangka waktu untuk menyerahkan laporan dengan laporan tahap 1 jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2023 dan laporan tahap 2 jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2024.

Penyaluran dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik. Rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a). atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam dapodik; b). nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional; dan c). dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI- RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf (a) meliputi: a). penerimaan Peserta Didik baru; b). pengembangan perpustakaan; c). pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d). pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e). pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah; f). pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g). pembiayaan langganan daya dan jasa; h). pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; i). penyediaan alat multimedia pembelajaran; j). penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k). penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l). pembayaran honor. Kemudian pendapat Irsan (2012) yang menyatakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka program-program BOS yang dimulai sejak Juli 2005 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu program pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Berdasarkan pengelompokan program BOS menurut hasil penelitian sebelumnya program tersebut merupakan program yang sangat ideal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia terutama sekolah-sekolah yang masih memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim. Kebutuhan dan penggunaan terhadap dana BOS akan sangat terasa manfaatnya bagi sekolah, kepala sekolah, guru dan terutama bagi para siswa yang membutuhkan bantuan dalam bentuk fasilitas sekolah. Dengan adanya dana BOS pemerintah mengharapkan program pendidikan nasional dapat dirasakan secara merata diseluruh lapisan masyarakat.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadiyanto (2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberi pengaruh secara positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Dengan adanya kerjasama yang positif antara sekolah dengan orangtua maka sekolah dengan orangtua siswa harus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan sebesar 27,81% dan diketahui juga bahwa kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpengaruh secara positif dan signifikan sebesar 71,19% terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Darmanto (2016) dengan hasil penelitian yang mengemukakan bahwa kontribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa miskin di sekolah swasta di Jakarta Timur, secara umum bisa disimpulkan bahwa bagi pihak sekolah, keberadaan dana BOS ini telah membantu meringankan beban operasional di sekolah swasta. Sekolah swasta merasa sangat terbantu dalam penyediaan sarana dan prasarana proses belajar mengajar di sekolah swasta. Seperti penyediaan buku mata pelajaran, perangkat komputer, LCD, dan laboratorium.

Tata kelola lembaga pendidikan. Pengawasan terhadap latihan fungsional sekolah dapat bekerja pada sifat pelatihan, sehingga partisipasi antar sekolah dan kelompok penasihat dapat memberikan masukan untuk menjamin kehadiran dan keselarasan organisasi sekolah dalam meningkatkan mutu, melalui kerjasama dengan dewan pengawas sekolah, daerah setempat akan lebih mungkin mengevaluasi dan mengontrol proyek yang diselesaikan oleh sekolah. Maka daerah juga akan lebih memperhatikan dan lebih kuat terhadap program sekolah sehingga lebih bermanfaat bagi daerah setempat, termasuk mendukung sumber daya keuangan dan pembangunan sekolah. Hal ini disebabkan oleh hasil penelitian Larasati (2009) dengan hasil penelaahan khususnya bahwa tugas dewan sekolah sebagai penyedia pertimbangan diakui melalui pemikiran terhadap penataan dan pemanfaatan dan pondasi yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran atau dana yang diperoleh sekolah, memberikan masukan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat melalui lembaga seperti komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan. Selain peran komite sekolah, salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan utama program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah

memberikan layanan pendidikan terjangkau dan bermutu terutama bagi siswa miskin (Rencana Strategi Kemenbud 2010-2014 2013: 3). Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah memiliki peran yang sangat besar terhadap peningkatan mutu pendidikan apabila difungsikan dan diberdayakan dengan baik oleh lembaga pendidikan. Kemudian program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan apabila dikelola dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan sasaran dan pemanfaatan dana BOS tersebut. Pemanfaatan dana BOS dicairkan di sekolah-sekolah kemudian pelaporannya dilakukan oleh manajemen BOS agar dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat penting untuk dilakukan mengingat fakta bahwa kualitas sekolah secara signifikan dipengaruhi oleh sifat administrasi dan pelaporan kepala sekolah. Pengembangan inovasi kepala sekolah memang diperlukan dalam hal penggunaan dana BOS karena segala kebutuhan yang tidak diwajibkan dalam juknis BOS harus dilaporkan sesuai juknis agar dalam pelaksanaan pemeriksaan baik pemerintah daerah maupun pusat tidak menjadi temuan yang merugikan negara. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui inovasi kepala sekolah yang tepat untuk memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 Hu'u.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Mixed Methods Research. Mixed Methods Research adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi seperti metode inkuiri. Metode ini merupakan gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Noor, 2011: 38). Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data kuantitatif diperoleh dari data kuisioner dengan menyebarkan angket pada responden yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi sejumlah 35 orang, dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua uji pemeriksaan keabsahan data, yakni uji validitas dan uji realibilitas. Teknik analisis data yang dipakai yaitu teknik analisis statistik non-parametris sebagaimana jenis penelitian bersifat asosiatif, dengan memakai uji korelasi Kendall's Tau-b pada SPSS. Uji korelasi Kendall Tau-b adalah bagian dari statistik non parametrik, dimana tidak ada asumsi atau persyaratan khusus yang mengharuskan bahwa data penelitian yang akan diuji harus berdistribusi normal (Sugiyono, 2016). Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa populasi asal sampel memiliki dua variabel dan tidak harus berdistribusi normal serta hubungan yang terbentuk tidak harus linear antara inovasi kepala sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Hu'u. Selanjutnya di teruskan dengan uji hipotesis untuk menjawab dugaan sementara, dan jika terdapat pengaruhnya maka dilanjutkan dengan perhitungan koefisien penentu (KP).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam menjelaskan adanya pengaruh antara inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS dapat digunakan analisis data statistik non-parametrik dengan Uji korelasi Kendall Tau-b melalui aplikasi SPSS 29.0.1.0 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Korelasi

Correlations				
Inovasi Kepala Sekolah		Penggunaan Dana BOS		
Kendall's tau_b	Inovasi Kepala Sekolah	Correlation Coefficient	1.000	-.171
		Sig. (2-tailed)	.	.185
		N	35	35
	Pengguna an Dana BOS	Correlation Coefficient	-.171	1.000
		Sig. (2-tailed)	.185	.
		N	35	35

Berdasarkan tabel analisis korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi hubungan antar variabel inovasi kepala sekolah (X) dengan pemanfaatan dana BOS (Y) yaitu 1,000 ini artinya jika dibandingkan dengan nilai sig.(2-tailed) dengan probabilitas 0,01 (1%) dengan ketentuan

bahwa Sig.(2-tailed) < 0,01 maka artinya hubungan antara dua variabel signifikan atau dengan kata lain ada hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya untuk melihat tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel berdasarkan tabel analisis korelasi yaitu $r = -0,171$ ini artinya level interpelasi koefisien korelasi pengaruh inovasi kepala sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS adalah tidak kuat dengan mengacu pada interval koefisien 0,51 - 0,75. Dilihat dari arahnya dengan nilai $r = -0,171$ dan bernilai negatif (-) atau tidak searah sehingga disimpulkan bahwa hubungan inovasi kepala sekolah dengan pemanfaatan dana BOS adalah masih kurang baik.

Sehingga untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis korelasi Kendall Tau-b sekaligus menjawab dari hipotesis penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh inovasi kepala sekolah dengan pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Hu'u. Hal ini berdasarkan ketentuan dari: Hipotesis alternatif (H_a): Jika signifikan < 0,01 maka hubungan dinyatakan tidak signifikan sehingga hipotesis ditolak, sehingga H_a : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Hu'u. Sehingga untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis korelasi Kendall Tau-b sekaligus menjawab dari hipotesis penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh inovasi kepala sekolah dengan pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Hu'u. Hal ini berdasarkan ketentuan dari: Hipotesis alternatif (H_a): Jika signifikan < 0,01 maka hubungan dinyatakan tidak signifikan sehingga hipotesis ditolak, sehingga H_a : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS terhadap mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Hu'u. untuk mengungkapkan sejauh mana kontribusi variabel X (inovasi kepala sekolah) Terhadap variabel Y (pemanfaatan dana BOS), maka dipakai formula:

$$\begin{aligned}\text{Koefisien Penentu (KP)} &= r^2 \times 100\% \\ &= (-0,171 \times -0,171) \times 100\% \\ &= 2,9241\%\end{aligned}$$

Hal tersebut menjelaskan bahwa Inovasi kepala Sekolah (X) mempengaruhi sebesar 2,9241% terhadap pemanfaatan dana BOS (Y) di SMP Negeri 2 Hu'u, sedangkan 97,0759 % dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

B. Pembahasan

Secara hasil data analisis baik antara variabel inovasi kepala sekolah maupun antara variabel pemanfaatan dana BOS sama-sama hasilnya baik, namun setelah keduanya dihubungkan memang terdapat pengaruh yang tidak signifikan, lemah dan kearah yang belum baik tetapi dilihat dari nilai sejauh mana kontribusi variabel X (inovasi kepala sekolah) terhadap variabel Y (pemanfaatan dana BOS) hanya 2,9241% dan termasuk kategori lemah. Pada awalnya peneliti berharap diakhir penelitian ini yaitu inovasi yang ingin diimplementasikan akan memperoleh hasil yang baik, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dari hasil data analisis yang didapat hanya 2,9241%, ini artinya ada faktor yang menjadi penghambat inovasi kepala sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS di SMP Negeri 2 Hu'u. Berdasarkan hasil survei berupa angket atau kuisiner, observasi, wawancara dan doku-mentasi perencanaan inovasi kepala sekolah pada penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Hu'u dijumpai ada beberapa hambatan baik itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam lingkungan sekolah. Adapun faktor yang menjadi penghambat dari dalam lingkungan sekolah disebabkan oleh penyusunan rancangan atau strategis inovasi terhadap pemanfaatan dana BOS tersebut belum maksimal. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan prestasi guru dan siswa untuk pelaksanaannya belum maksimal. Sehingga mengakibatkan sedikitnya persentase dari pengaruh inovasi kepala sekolah pada pemanfaatan dana BOS.

Inovasi dalam pemanfaatan dana BOS yaitu dengan melakukan penghematan anggaran pada setiap kegiatan agar dananya lebih. Kemudian kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti sekolah sementara yang tidak masuk dalam perencanaan penggunaan dana BOS. Kegiatan- kegiatan seperti perlombaan, perayaan hari-hari besar seperti hari kebangkinan bangsa, hari pendidikan nasional dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di bidang pembinaan karakter. Inovasi dilakukan ketika ada kegiatan yang sifatnya dadakan yang tidak masuk dalam RKAS, seperti ada

undangan seminar untuk peningkatan mutu guru. Mengantisipasi hal itu, maka kegiatan tersebut dimasukkan dalam juknis peningkatan mutu guru dan siswa. Selain itu ada kegiatan-kegiatan sifatnya penting, seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), yang mana sebelumnya yang direncanakan hanya satu simulasi, tiba-tiba ada dua simulasi. Maka kepala sekolah bersama kurikulum, kemudian bendahara, kemudian tim manajemen BOS sekolah melakukan rapat bersama untuk mencari solusi guna mengikutkan sesuai tuntutan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana strategi inovasi kepala sekolah yang tepat untuk memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 Hu'u.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan hasil analisis data korelasi diperoleh nilai koefisien korelasi hubungan antar variabel inovasi kepala sekolah (X) dengan pemanfaatan dana BOS (Y) yaitu 1,000 ini artinya jika dibandingkan dengan nilai sig. (2- tailed) dengan probabilitas 0,01 (1%) dengan ketentuan bahwa Sig.(2-tailed) < 0,01 maka artinya hubungan antara dua variabel signifikan atau dengan kata lain ada hubungan antara dua variabel tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas dari strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 2 Hu'u memiliki hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas. Bahwa, tidak terdapat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel berdasarkan analisis korelasi yaitu $r = -0,171$ ini artinya level interpelasi koefisien korelasi pengaruh inovasi kepala sekolah terhadap pemanfaatan dana BOS adalah tidak kuat dengan mengacu pada interval koefisien 0,51 - 0,75. Dilihat dari arahnya dengan nilai $r = -0,171$ dan bernilai negatif (-) atau tidak searah sehingga disimpulkan bahwa hubungan inovasi kepala sekolah dengan pemanfaatan dana BOS adalah masih kurang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang disampaikan oleh penulis melalui strategi inovasi kepala sekolah dalam pemanfaatan dana BOS tersebut, yaitu hendaknya pengelola Dana BOS, supaya melakukan inovasi terkait pemanfaatan data BOS. Inovasi yang dapat dilakukan meliputi penghematan anggaran, penyesuaian penyusunan RKAS dan penyesuaian penyusunan LPJ. Pengelola Dana BOS, supaya memberikan sosialisasi secara rinci dan jelas tentang petunjuk teknis BOS dan pagu anggaran setiap program yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kemudian meminimalisir pengeluaran yang tidak dianggarkan di RKAS dengan cara memberikan pengertian kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang rambu-rambu penggunaan dana BOS. Sedangkan guru dan penanggungjawab program kegiatan sekolah hendaknya menyusun anggaran kegiatan dengan mengacu pada rapor mutu sekolah. Hendaknya tim manajemen BOS kabupaten dan inspektorat supaya melakukan bedah juknis BOS agar mendapatkan pemahaman yang sama, melakukan perbaikan pengarsipan laporan pertanggungjawaban dana BOS dan memberi saran kepada pemerintah pusat agar tidak terlalu sering merubah juknis BOS.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, A. (2022). Peran Manajerial Kepala Sekolah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SDN 14 Dompu). *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(2), 126-136. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i4.98>
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Achmad Fawaid, Pengalih Bahasa). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, A. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Islam. PT Raja Grafindo Persada.

- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan.
- Hikmat. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ilham, I. (2021). Kebijakan Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 154–161. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.70>
- Ismail, Pane dkk. (2021). *Desain Penelitian Mixed Metho*. Banda Aceh. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Kuantitatif, Penelitian Kombinasi, dan Penelitian Tindakan dan Penelitian Evaluasi). Alfabeta.
- Kurniawan, A., W., & Zarah Puspitaningtyas. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Moleong, L.J., (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Morse, J. M. (2010). *Prinsip-Prinsip Metode Campuran dan Rancangan Penelitian Multimetode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No.63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Setiawan, D., Aziz, S. A., & Hilman, C. (2022). Pengembangan Social dan Pembangunan Pendidikan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 74–84. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.217>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2015). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed)*. Alfabeta.
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Tim Penyusun. (2023). *Pedoman Penyusunan Tesis*. Sumbawa: Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Alfabeta.